



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pancasila Nomor 03 Sanggau 78512
Telp / Fax (0564) 21662 E-mail : Satpolpp@mail.sanggau.go.id
Website : www.satpolpp.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, maka perlu meningkatkan pelayanan public di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan public, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4563);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Preiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Preiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- KETIGA** : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 01 April 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SANGGAU**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : TAHUN 2022
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

BAGIAN SEKRETARIAT		
I	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Pol PP	
	1	SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis
	2	SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
	3	SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
	4	SOP Penyusunan Buku Kas Umum
	5	SOP Register Penutupan Kas
	6	SOP Pembayaran Gaji
	7	SOP Pencairan Dna (UP, GU dan TU)
	8	SOP Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS
	9	SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
	10	SOP Penyusunan Buku Panjar
	11	SOP Penyusunan Buku Kas Tunai
	12	SOP Penyusunan Buku Simpanan Bank
	13	SOP Penyusunan Buku Pajak
	14	SOP Rekapitulasi Rincian Objek Belanja (ROB)
	15	SOP SPJ Fungsional
	16	SOP Verifikasi SPJ
	17	SOP Pengesahan Laporan SPJ
	18	SOP Penyusunan Buku Besar
	19	SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (RLA)
	20	SOP Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
	21	SOP Penjurnalan
	22	SOP Penyusunan Neraca
	23	SOP Penyusunan Neraca Saldo
	24	SOP Penyusunan Prognosis
	25	SOP Penyusunan RKBU
	26	SOP RKBU
	27	SOP Pengurus Barang
	28	SOP Penyimpanan Barang
	29	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT)
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	1	SOP Penanganan Surat Masuk
	2	SOP Penanganan Surat Keluar

3	SOP Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
4	SOP Pelayanan Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
5	Pengumpula Saran Kinerja Pegawai (SKP)
6	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler
7	SOP Pengusulan Ujian Dinas
8	SOP Pengusulan Perubahan Status CPNS Menjadi PNS
9	SOP Pengusulan Pensiun
10	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
11	SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
12	SOP Pengusulan Diklat
13	SOP2 Pengajuan Cuti Pegawai
14	SOP Pengusulan Izin Belajar dan Tugas Belajar

BIDANG PENEGAKAN PERUDANG-UNDANGAN DAERAH

1	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1	Pelayanan Pengaduan
2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada
3	Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada
4	Penindakan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada
5	Intelejen/ Penjaringan Informasi
3	Seksi Bina Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1	SOP Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perkada

BIDANG KETENTRAMAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I	Seksi Operasional dan Pengendalian
1	SOP Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
2	SOP Pengawasan dan Pengamanan Kepala Daerah dan Tamu Daerah
3	SOP Raider Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati
4	SOP Pengamanan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Aset Daerah.
2	Seksi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1	SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
2	SOP Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3	SOP Sosialisasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4	SOP Penanganan Pengaduan

PEMADAM KEBAKARAN	
1	Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran
	SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
2	Seksi Penanggulangan Kebakaran
1	SOP Pencegahan Kebakaran
2	SOP Penanggulangan Bahaya Kebakaran

KEPALA SATAUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SANGGAU,



VICTORIANUS, S.Sos

Rembina Tk. I

NIP. 19630808 198612 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sanggau di Sanggau (sebagai laporan)
Cq. Kabag Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kab. Sanggau di Sanggau.
2. Inspektorat Kabupaten Sanggau di Sanggau.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau di Sanggau
4. Bendahara Pengeluaran Sat. Pol PP Kab. Sanggau di Sanggau
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya